

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Bernhard Limbong, *Hukum Agraria Nasional*, Pustaka Margaretha, Jakarta, 2012.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah Edisi Revisi*, Djambatan, Jakarta, 2018.

Effendi Perangin, *Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1986.

Indonesia Legal Center Publishing, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Hak-Hak Atas Tanah*, CV Karya Gemilang, Jakarta 2010.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2002.

Rudi Indrajaya dan Rizkika Arkana Putera Indrajaya, *Perubahan Status Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2019.

Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2012.

Waskito dan Hadi Arnowo, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, Kencana, 2017.

Op.Cit, Bernhard Limbong, hlm 89

Op.Cit, Rudi Indrajaya dan Rizkika Arkana Putera Indrajaya, hlm 67

Op.Cit, Urip Santoso, hlm 92

Op.Cit, Urip Santoso, hlm 95

Op.Cit, Urip Santoso, hlm 109

Loc.Cit, Urip Santoso, hlm 110

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas
Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-
Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 Tentang
Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara
dan Hak Pengelolaan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 Tentang
Pedoman Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional dan Kantor Pertanahan

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Peningkatan Hak Milik Atas
Tanah untuk Rumah Tinggal

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah
Yang Dibebeani Hak Tanggungan

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Surat

Edaran Tanggal 18 Februari Tahun 1990 Nomor 500-3460
Tentang Pertanahan

C. Sumber Lainnya

Olivia Yanuari Huslan, Skripsi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) di Atas Hak Pengelolaan*, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2016.

Widiyanti, Skripsi, *Pelaksanaan Peningkatan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Untuk Rumah Tinggal Di Kantor Pertanahan Kota Semarang*, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2006.

<https://irmadevita.com/2017/peningkatan-status-dari-hak-guna-usaha-menjadi-hak-milik-untuk-rumah-tinggal/>

<https://www.lamudi.co.id/journal/perbedaan-hak-guna-bangunan-dengan-hak-milik/>

<http://diy.atrbpn.go.id/id-id/Tentang-Kami/Visi-Misi-dan-Strategi.aspx>

<https://www.atrbpn.go.id>

KARAWANG